



LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023
BAGIAN ANGGARAN 005.01

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Jln. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit

Jakarta Timur - DKI Jakarta 13440

Telp. 86902313 Fax. 86902314

email : keuanganptjakarta2013@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
AUDITED

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

BAGIAN ANGGARAN 005. 01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Radin Inten II No.3 Duren Sawit

Jakarta Timur - DKI Jakarta 13440

Telp. 86902313 Fax. 86902314

e-mail : keuangan.ptajakarta2013@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 6 Mei 2024
Sekretaris

Drs. Nasrulloh, M.Si
NIP. 196506131985031001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Persediaan	
C.6 Tanah	
C.7 Peralatan dan Mesin	
C.8 Gedung dan Bangunan	
C.9 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.10 Aset Tetap Lainnya	
C.11 Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.12 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.13 Aset Tak Berwujud	
C.14 Aset Lain-lain	
C.15 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.16 Utang kepada Pihak Ketiga	
C.17 Uang Muka dari KPPN	
C.18 Ekuitas	
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2 Beban Pegawai	
D.3 Beban Persediaan	
D.4 Beban Barang dan Jasa	
D.5 Beban Pemeliharaan	
D.6 Beban Perjalanan Dinas	
D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8 Beban Bantuan Sosial	
D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi	

D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	40
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jakarta, 6 Mei 2024
Sekretaris

Drs. Nasrulloh, M.Si
NIP.196506131985031001



RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.937.350 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp14.937.350 atau mencapai 52,37 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp28.522.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp22.077.929.266 atau mencapai 97,38 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp22.670.912.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2023 . Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp24.148.574.059 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp6.251.825; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp24.142.322.234 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp63.380.368 dan Rp24.085.193.691

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.937.350 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp21.929.899.497 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-21.914.962.147, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-21.914.962.147.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp23.845.682.672, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-21.914.962.147 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 22.154.473.166 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp24.085.193.691

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

URAIAN	Catatan	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	28.522.000	14.937.350	52,37	23.710.612
JUMLAH PENDAPATAN		28.522.000	14.937.350	52,37	23.710.612
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	18.383.028.000	17.812.871.850	96,90	18.233.457.840
Belanja Barang	B.2.2	4.088.884.000	4.066.507.416	99,45	4.283.861.328
Belanja Modal	B.2.3	199.000.000	198.550.000	99,77	259.359.336
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		22.670.912.000	22.077.929.266	97,38	22.776.678.504


 Jakarta, 6 Mei 2024
 Sekretaris
 Drs. Nasrulloh, M.Si
 NIP. 196506131985031001

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

U R A I A N	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	1.748.250	-
Persediaan	C.5	4.503.575	6.020.290
Jumlah Aset Lancar		6.251.825	6.020.290
ASET TETAP			
Tanah	C.6	20.367.671.000	20.367.671.000
Peralatan dan Mesin	C.7	5.601.478.199	5.238.647.712
Gedung dan Bangunan	C.8	3.514.357.416	3.485.802.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.9	49.563.000	49.563.000
Aset Tetap Lainnya	C.10	238.855.863	21.847.855
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.11	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.12	(5.629.603.244)	(5.275.251.406)
Jumlah Aset Tetap		24.142.322.234	23.888.280.161
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.13	34.075.000	34.075.000
Aset Lain-lain	C.14	3.502.880	3.502.880
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.15	(37.577.880)	(37.577.880)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		24.148.574.059	23.894.300.451
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.16	63.380.368	48.617.779
Uang Muka dari KPPN	C.17	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		63.380.368	48.617.779
JUMLAH KEWAJIBAN		63.380.368	48.617.779
EKUITAS			
Ekuitas	C.18	24.085.193.691	23.845.682.672
JUMLAH EKUTAS		24.085.193.691	23.845.682.672
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		24.148.574.059	23.894.300.451

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	14.937.350	23.710.581
Jumlah Pendapatan		14.937.350	23.710.581
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	17.826.209.928	18.234.169.678
Beban Persediaan	D.4	101.683.865	96.320.703
Beban Barang dan Jasa	D.5	2.879.607.797	3.088.269.072
Beban Pemeliharaan	D.6	670.712.908	905.557.055
Beban Perjalanan Dinas	D.7	110.401.911	181.519.593
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	341.283.088	293.171.146
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		21.929.899.497	22.799.007.247
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(21.914.962.147)	(22.775.296.666)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	31
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		-	31
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(21.914.962.147)	(22.775.296.635)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(21.914.962.147)	(22.775.296.635)


 Jakarta, 6 Mei 2024
 Sekretaris
 Drs. Nasrulloh, M.Si
 NIP. 196506131985031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	23.845.682.672	23.750.012.665
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(21.914.962.147)	(22.775.296.635)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	22.154.473.166	22.870.966.642
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		239.511.019	95.670.007
EKUITAS AKHIR	E.6	24.085.193.691	23.845.682.672



 Jakarta, 6 Mei 2024
 Sekretaris
 Drs. Nasrulloh, M.Si
 NIP. 196506131985031001

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

*Dasar hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

A.1.1. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
- 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 18 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 19 Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
- 20 Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;

- 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- 22 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis AkruaI dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.1.2. Rencana Strategis

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM 4 (empat) sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020–2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Visi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut: “TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA YANG AGUNG”

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang Agung bercirikan:

- 1 Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
- 2 Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN
- 3 Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
- 4 Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara secara sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
- 5 Mengelola sarana dan parasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;

- 6 Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
- 7 Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
- 8 Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
- 9 Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi;
- 10 Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu;

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
- 2 Meningkatkan kualitas aparat peradilan;
- 3 Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;
- 4 Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar

sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang

menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek**
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang**
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2023	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	28.522.000	28.522.000
Jumlah Pendapatan	28.522.000	28.522.000
Belanja		
Belanja Pegawai	21.483.028.000	18.383.028.000
Belanja Barang	4.071.153.000	4.088.884.000
Belanja Modal	-	199.000.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	25.554.181.000	22.670.912.000

Realisasi Pendapatan
Rp14.937.350

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.937.350 atau mencapai 52,37 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp28.522.000. Pendapatan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp14.937.350. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp8.773.262,00 atau 37,00% dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2023. Hal tersebut disebabkan karena berkurangnya Pendapatan dari Sewa Tanah gedung dan bangunan, serta berkurangnya Pendapatan Pengembalian atas belanja pegawai yang berasal dari tahun anggaran yang lalu. dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	28.522.000	14.937.350	52,37
Jumlah	28.522.000	14.937.350	52,37

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 37,00 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	14.937.350	23.710.612	(37,00)
Jumlah	14.937.350	23.710.612	(37,00)

Realisasi Penerimaan
Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA TA 2023 sebesar 0,00 dari TA 2022 . Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

*Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp14.937.350*

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp14.937.350 dan Rp23.710.612. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2023 mengalami penurunan sebesar 37,00 dari TA 2022 Pembayaran atas sewa Rumash Dinas Ketua, Wakil Ketua dan Panitera. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	14.937.350	23.710.612	(37,00)
Jumlah	14.937.350	23.710.612	(37,00)

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	14.937.350	23.710.581	(37,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	31	(100,00)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	14.937.350	23.710.612	(37,00)

B.2 Belanja

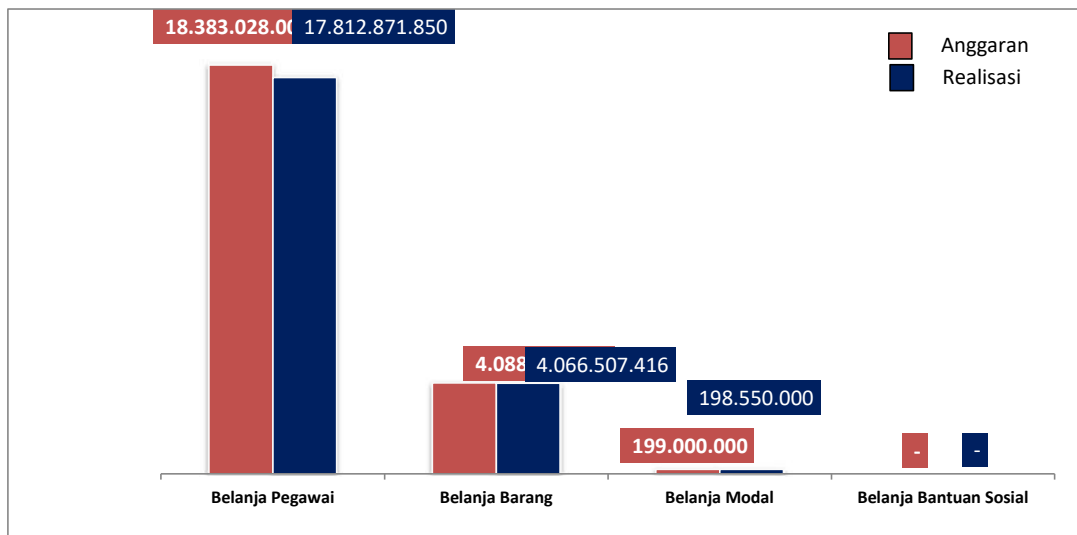
Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp22.077.929.266 atau 97,38 % dari anggaran belanja sebesar Rp.22.670.912.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2023

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	18.383.028.000	17.812.871.850	96,90
Belanja Barang	4.088.884.000	4.066.507.416	99,45
Belanja Modal	199.000.000	198.550.000	99,77
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	22.670.912.000	22.077.929.266	97,38

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2023



Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 3,07% . Berikut rincian realisasi belanja TA 2023 dan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Pegawai	17.812.871.850	18.233.457.840	(2,31)
Belanja Barang	4.066.507.416	4.283.861.328	(5,07)
Belanja Modal	198.550.000	259.359.336	(23,45)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	22.077.929.266	22.776.678.504	(3,07)

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp17.812.871.850 dan Rp18.233.457.840. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami penurunan sebesar 2,31 % dari TA 2022. Hal ini disebabkan Penurunan Belanja Pegawai disebabkan adanya Hakim Tinggi yang pensiun dan mutasi antar satker.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Gaji Pokok PNS	4.952.986.100	4.567.186.200	8,45
Belanja Pembulatan Gaji PNS	51.653	51.871	(0,42)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	382.729.324	341.197.358	12,17
Belanja Tunj. Anak PNS	76.697.668	64.229.730	19,41
Belanja Tunj. Struktural PNS	93.870.000	91.080.000	3,06
Belanja Tunj. Fungsional PNS	9.597.180.000	10.351.360.000	(7,29)
Belanja Tunj. PPh PNS	1.844.140.118	2.068.337.340	(10,84)
Belanja Tunj. Beras PNS	204.586.500	177.066.900	15,54
Belanja Uang Makan PNS	626.302.000	557.289.000	12,38
Belanja Tunjangan Umum PNS	22.980.000	15.845.000	45,03
Belanja Uang Lembur	-	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	-	-	-
Belanja Gaji Pokok PPPK	11.866.000	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	140	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PPPK	1.972.000	-	-
Belanja Tunj. Beras PPPK	289.680	-	-
Belanja Uang Makan PPPK	2.035.000	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	17.817.686.183	18.233.643.399	(2,28)
Pengembalian Belanja Pegawai	4.814.333	185.559	2.494,50
Jumlah Belanja	17.812.871.850	18.233.457.840	(2,31)

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.066.507.416 dan Rp4.283.861.328. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan sebesar 5,07% dari Realisasi TA 2022.

Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan/penurunan belanja tidak banyak perubahan

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Barang Operasional	1.735.035.817	1.657.141.949	4,70
Belanja Barang Non Operasional	11.942.000	10.412.000	14,69
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	104.879.650	95.236.388	10,13
Belanja Jasa	1.132.953.719	1.440.991.518	(21,38)
Belanja Pemeliharaan	971.294.319	898.559.880	8,09
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	110.401.911	181.519.593	(39,18)
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	4.066.507.416	4.283.861.328	(5,07)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	4.066.507.416	4.283.861.328	(5,07)

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2023

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-
		-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp198.550.000 dan Rp259.359.336. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar 23,45% dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh karena penurunan pagu belanja modal di TA 2023 dan sampai dengan periode pelaporan Tahun 2023 .

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.550.000	259.359.336	(23,45)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	198.550.000	259.359.336	(23,45)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	198.550.000	259.359.336	(23,45)

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2023 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2022 . Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp198.550.000 dan Rp259.359.336, mengalami penurunan sebesar 23,45 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan oleh Penurunan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disebabkan oleh penurunan pagu Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2023 sebesar 23,45% dibandingkan dengan pagu TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.550.000	259.359.336	(23,45)
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	198.550.000	259.359.336	(23,45)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	198.550.000	259.359.336	(23,45)

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2022. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2023 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2022. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Uang Tunai di Brankas	-	-
Kwitansi UP belum di SPJ-kan	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp1.748.250

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.748.250 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	1.748.250,00	-
	-	-
	-	-
Jumlah	1.748.250	-

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

Berupa pembayaran Web Hosting dengan Jangka Waktu 6 Agustus 2023 s/d 5 Agustus 2024

Persediaan Rp4.503.575

C.5 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp4.503.575 dan Rp6.020.290. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Jenis	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Barang Konsumsi	4.383.575	5.810.290
Bahan untuk Pemeliharaan	120.000	210.000
Jumlah	4.503.575	6.020.290

Persediaan tersebut di atas dalam Kondisi Baik

Tanah
Rp20.367.671.000

C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp20.367.671.000 dan Rp20.367.671.000. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	20.367.671.000
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
Saldo per 31 Desember 2023	20.367.671.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Audited) TA 2023

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	732 M2	jalan H. Sinen Pasar Minggu, Ragunan, Jakarta Selatan	15.215.744.000
2	592 M2	Jalan Swakarsa V Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur	5.151.927.000
3	-	-	-
Jumlah			20.367.671.000

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Kondisi Tanah yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Jakarta hanya berupa Tanah Rumah Dinas sedangkan Tanah Untuk Gedung Bangunan Kantor Tidak Ada atau lebih tepatnya belum memiliki tanah kantor

Peralatan dan Mesin
Rp5.601.478.199

C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp5.601.478.199 dan Rp5.238.647.712. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	5.238.647.712
Mutasi tambah:	
Pembelian	198.550.000
Transfer Masuk	104.550.000
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
Saldo per 31 Desember 2023	5.601.478.199
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(5.045.092.574)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	556.385.625

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- Pembelian 19 Buah Kursi Besi Metal Senator 1 HDT sebesar Rp. 156.730.000,-
- Pembelian 1 Buah Kursi Besi Metal Casena sebesar Rp. 22.380.000,-
- Pembelian 4 Buah A.C. Split Merk Polytron 1 PK sebesar Rp. 19.800.000,-
- Transfer masuk 1 Unit Server Fujitsu sebesar Rp. 84.700.000,- dan
- Transfer Masuk 1 Unit Scanner Fujitsu sebesar Rp. 19.850.000,-
- Pendapatan Perolehan Lainnya atas pengadaan lemari besi menggunakan belanja pemeliharaan gedung sebesar Rp. 55.734.487,-
- Pendapatan Perolehan Lainnya atas pengadaan Exhaust Fan menggunakan belanja pemeliharaan gedung sebesar Rp. 3.996.000,-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.8 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.514.357.416 dan Rp3.485.802.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	3.485.802.000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
Perolehan Lainnya	28.555.416
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2023	3.514.357.416
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(567.163.620)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	2.947.193.796

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- Pendapatan Perolehan Lainnya atas pengadaan Kanopi menggunakan belanja pemeliharaan gedung sebesar Rp. 28.555.416,-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.9 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.49.563.000 dan Rp.49.563.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	49.563.000
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	49.563.000
Akumulasi Penyusutan s.d.	(17.347.050)
Nilai Buku per	32.215.950

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.238.855.863 dan Rp.21.847.855. Aset tetap tersebut Penambahan dalam Aset Gedung dan Bangunan Milik PEMDA. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	21.847.855
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
Perolehan Lainnya	217.008.008
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2023	238.855.863
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	238.855.863

Mutasi tambah/kurang:

Pendapatan Perolehan Lainnya atas pemasangan partisi menggunakan belanja pemeliharaan gedung sebesar Rp. 38.259.158.- , Pendapatan Perolehan Lainnya atas penggantian paving block menggunakan belanja pemeliharaan gedung sebesar Rp. 134.348.850,- dan Pendapatan Perolehan Lainnya atas Pemasangan Instalasi speaker menggunakan belanja pemeliharaan gedung sebesar Rp. 44.400.000,-

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.11 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2023	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.12 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp5.629.603.244 dan Rp5.275.251.406. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2023

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5.601.478.199	(5.045.092.574)	556.385.625
2	Gedung dan Bangunan	3.514.357.416	(567.163.620)	2.947.193.796
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.563.000	(17.347.050)	32.215.950
4	Aset Tetap Lainnya	238.855.863	-	238.855.863
Akumulasi Penyusutan		9.404.254.478	(5.629.603.244)	3.774.651.234

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

C.13 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp34.075.000 dan Rp34.075.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2023	34.075.000
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	34.075.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	(34.075.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

C.14 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp3.502.880 dan Rp3.502.880. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023	3.502.880
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2023	3.502.880
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	(3.502.880)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 37.577.880

C.15 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp37.577.880 dan Rp37.577.880. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	34.075.000	(34.075.000)	-
Aset Lain-lain	3.502.880	(3.502.880)	-
-	-	-	-
Total	37.577.880	(37.577.880)	-

Utang kepada Pihak Ketiga Rp63.380.368

C.16 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	58.606.078	45.268.000
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	4.774.290	3.349.779
Beban Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Total	63.380.368	48.617.779

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Belanja Pegawai berupa Uang Makan pegawai Bulan Desember 2023, Uang Makan Susulan bulan Desember 2023, Kekurangan Gaji atas KGB Panitera a.n Sujarwo, SH., Gaji susulan PPPK bulan Desember 2023 a.n Ridwan Anwar, S.E. dan Uang Makan PPPK Bulan Desember 2023 sedangkan Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar adalah Langganan Telepon bulan Desember 2023 dan langganan air bulan November dan Desember 2023

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.17 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Ekuitas
Rp24.085.193.691

C.18 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp24.085.193.691. dan Rp23.845.682.672. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp14.937.350

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp14.937.350 dan Rp23.710.581. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 37,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	14.937.350	23.710.581,00	(37,00)
Pendapatan Ongkos Perkara	-	-	-
Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	-	-	-
Jumlah	14.937.350,00	23.710.581,00	(37,00)

Beban Pegawai
Rp17.826.209.928

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp17.826.209.928 dan Rp18.234.169.678.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar 2,24 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh . Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Gaji Pokok PNS	4.952.351.900	4.566.961.500	8,44
Beban Pembulatan Gaji PNS	51.617	51.284	0,65
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	383.094.084	341.187.048	12,28
Beban Tunj. Anak PNS	76.747.408	64.225.606	19,50
Beban Tunj. Struktural PNS	93.870.000	91.080.000	3,06
Beban Tunj. Fungsional PNS	9.596.720.000	10.351.360.000	(7,29)
Beban Tunj. PPh PNS	1.844.333.028	2.068.337.340	(10,83)
Beban Tunj. Beras PNS	204.514.080	177.066.900	15,50
Beban Uang Makan PNS	630.179.000	558.240.000	12,89
Beban Tunjangan Umum PNS	22.980.000	15.660.000	46,74
Beban Uang Lembur	-	-	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	-	-	-

Belanja Gaji Pokok PPPK	14.832.500	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	141	-	-
Belanja Tunj. Suami/ Istri PPPK	296.650	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PPPK	2.512.000	-	-
Belanja Tunj. Beras PPPK	434.520	-	-
Belanja Uang Makan PPPK	3.293.000	-	-
Jumlah	17.826.209.928	18.234.169.678	(2,24)

*Beban Persediaan
Rp101.683.865*

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp101.683.865 dan Rp96.320.703

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,57 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Persediaan konsumsi	101.683.865	96.320.703	5,57
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	101.683.865,00	96.320.703	5,57

*Beban Barang dan Jasa
Rp2.879.607.797*

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.879.607.797 dan Rp3.088.269.072.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 6,76 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Belanja untuk penanganan Rp. . Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Keperluan Perkantoran	1.590.903.717	1.424.662.548	11,67
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.785.000	765.250	133,26
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	90.456.000	53.040.000	70,54
Beban Barang Operasional Lainnya	51.891.100	166.334.906	(68,80)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	12.339.245	(100,00)
Beban Langganan Listrik	-	230.127.473	(100,00)
Beban Langganan Telepon	21.632.121	21.559.663	0,34
Beban Langganan Air	15.744.845	18.266.565	(13,81)
Beban Sewa	1.095.253.014	1.140.058.422	(3,93)
Jumlah	2.879.607.797	3.088.269.072,00	(6,76)

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp670.712.908 dan Rp905.557.055.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 25,93 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan adanya beban terkait asuransi pesawat yang memiliki nilai cukup besar. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	113.243.404	406.937.562	(72,17)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	114.443.350	109.938.742	4,10
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	438.313.654	381.683.576	14,84
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4.712.500	6.997.175	(32,65)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	670.712.908	905.557.055	(25,93)

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp110.401.911 dan Rp181.519.593

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 39,18 persen disebabkan oleh . Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Perjalanan Biasa	51.396.911	44.569.593	15,32
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.475.000	52.160.000	(37,74)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	26.530.000	84.790.000	(68,71)
	-	-	-
Jumlah	110.401.911,00	181.519.593	(39,18)

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp341.283.088

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp341.283.088 dan Rp293.171.146.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	252.304.826	204.763.992	23,22
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	87.739.187	87.168.079	0,66
Beban Penyusutan Jaringan	1.239.075	1.239.075	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU	-	-	-
	-	-	-
Jumah Penyusutan	341.283.088	293.171.146	16,41
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	341.283.088	293.171.146	16,41

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Penyisihan Piutang PNBPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp0

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp31.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	31,00	(100,00)
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Jumlah	-	31	(100,00)

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Audited) 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan PNBPN	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Audited) 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp23.845.682.672,00

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.23.845.682.672,00 dan Rp.23.750.012.665,00

Defisit LO
Rp.21.914.962.147,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.21.914.962.147,00 dan Rp.22.775.296.635,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset
Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2023

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi Rp0

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. .

Koreksi ini

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2023

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2023

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas
Rp22.154.473.166

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.22.154.473.166 dan Rp.22.870.966.642. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	22.077.929.266
Diterima dari Entitas Lain	(14.937.350)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	91.481.250
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	22.154.473.166

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DKEL sebesar Rp 22.077.929.266, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 14.937.350

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2023

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp91.481.250 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2023

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2023 disajikan pada lampiran

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.24.085.193.691,00 dan Rp.23.845.682.672,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Akhir
Rp24.085.193.691

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca pada satuan kerja Badan Urusan Administrasi yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2023

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1) Daftar Rekening Pemerintah yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yaitu :

a. BRI Unit Pulogadung Jakarta a/c 653244011121000 a.n. BPG175.PTA JAKARTA (401112) digunakan sebagai Penampung Uang APBN untuk DIPA BUA dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,-

2) Penjelasan terkait Jurnal Bantu pada menu Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Manual pada SAKTI Tahun 2023.

a. Jurnal Penyesuaian

- Pada tanggal 31 Desember 2023 merupakan Jurnal Akrual Uang Makan Bulan Desember 2023 atas Pembayaran yang dilakukan di Bulan Januari 2024.
- Pada tanggal 31 Desember 2023 merupakan Jurnal Akrual Uang Makan Susulan Bulan Desember atas Pembayaran yang dilakukan di Bulan Januari 2024.
- Pada tanggal 31 Desember 2023 merupakan Jurnal Akrual Kekurangan Gaji KGB Pak Panitera atas Pembayaran yang dilakukan di Bulan Januari 2024.
- Pada tanggal 31 Desember 2023 merupakan Jurnal Akrual atas Beban Langanan Air Bulan November dan Desember 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024

b. Jurnal Manual

- Pada tanggal 31 Desember 2023 merupakan jurnal Akrual atas Gaji Susulan PPPK Bulan Desember 2023 yang dibayarkan Bulan Januari 2024
- Pada tanggal 31 Desember 2023 merupakan jurnal Akrual atas Uang Makan PPPK Bulan Desember 2023 yang dibayarkan Bulan Januari 2024
- Pada tanggal 31 Desember 2023 merupakan Jurnal Eliminasi Pendapatan pelorehan aset lainnya atas pengadaan kanopi menggunakan belanja pemeliharaan gedung
- Pada tanggal 31 Desember 2023 merupakan Jurnal Eliminasi Pendapatan pelorehan aset lainnya atas pengadaan lemari besi menggunakan belanja pemeliharaan gedung
- Pada tanggal 31 Desember 2023 merupakan Jurnal Eliminasi Pendapatan pelorehan aset lainnya atas pengadaan Exhaust Fan menggunakan belanja pemeliharaan gedung
- Pada tanggal 31 Desember 2023 merupakan Jurnal Eliminasi Pendapatan pelorehan aset lainnya atas berupa ATR pada gedung Pemda DKI Jakarta menggunakan belanja pemeliharaan gedung

LAMPIRAN A.1

TABEL PENYUSUTAN TAHUN 2023 - AUDITED

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	TOTAL	
131111	Tanah	1,309	20,367,671,000	0	0	0	20,367,671,000
20101	TANAH PERSIL	1,309	20,367,671,000	0	0	0	20,367,671,000
132111	Peralatan dan Mesin	610	5,601,478,199	(4,779,718,998)	(265,373,576)	(5,045,092,574)	556,385,625
30103	ALAT BANTU	1	45,909,000	(45,909,000)	0	(45,909,000)	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	16	1,775,474,512	(1,775,474,512)	0	(1,775,474,512)	0
30501	ALAT KANTOR	129	599,527,588	(487,285,041)	(33,169,958)	(520,454,999)	79,072,589
30502	ALAT RUMAH TANGGA	251	1,247,387,656	(995,845,252)	(40,962,468)	(1,036,807,720)	210,579,936
30601	ALAT STUDIO	17	134,948,640	(124,356,840)	(7,061,200)	(131,418,040)	3,530,600
30602	ALAT KOMUNIKASI	14	37,764,900	(32,864,900)	(1,960,000)	(34,824,900)	2,940,000
31001	KOMPUTER UNIT	130	1,406,338,919	(1,146,806,469)	(120,263,700)	(1,267,070,169)	139,268,750
31002	PERALATAN KOMPUTER	52	354,126,984	(171,176,984)	(61,956,250)	(233,133,234)	120,993,750
133111	Gedung dan Bangunan	9	3,514,357,416	(479,424,433)	(87,739,187)	(567,163,620)	2,947,193,796
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	28,555,416	0	(571,108)	(571,108)	27,984,308
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	8	3,485,802,000	(479,424,433)	(87,168,079)	(566,592,512)	2,919,209,488
134113	Jaringan	1	49,563,000	(16,107,975)	(1,239,075)	(17,347,050)	32,215,950
50402	JARINGAN LISTRIK	1	49,563,000	(16,107,975)	(1,239,075)	(17,347,050)	32,215,950
135111	Aset Tetap Renovasi	1	217,008,008	0	0	0	217,008,008
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	1	217,008,008	0	0	0	217,008,008
135121	Aset Tetap Lainnya	265	21,847,855	0	0	0	21,847,855
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	231	19,472,855	0	0	0	19,472,855
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	7	600,000	0	0	0	600,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	2	1,150,000	0	0	0	1,150,000
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	25	625,000	0	0	0	625,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	4	3,502,880	(3,502,880)	0	(3,502,880)	0
30501	ALAT KANTOR	2	1,430,080	(1,430,080)	0	(1,430,080)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1	18,000	(18,000)	0	(18,000)	0
30601	ALAT STUDIO	1	2,054,800	(2,054,800)	0	(2,054,800)	0
JUMLAH		2,199	29,775,428,358	(5,278,754,286)	(354,351,838)	(5,633,106,124)	24,142,322,234

LAMPIRAN A.2
TABEL RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
TAHUN 2023

SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2023	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI
NIHIL					
TOTAL					

LAMPIRAN A.3
HIBAH
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2023

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
1	NIHIL						
2							
3							

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

**KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUNAN 2023 (Audited)**

Kode dan Nama UAKPA : (401112) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Kode dan Nama UAPPAW : (401112) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Kode dan Nama Eselon 1 : (01) Badan Urusan Administrasi

Kode dan Nama K/L : (005) Mahkamah Agung RI

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak

Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah

		Ada	Tidak	Seharusnya
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)			
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBP		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak

7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	√		Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	√		Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	√		Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya

1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		√	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 2022 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya		√	Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar		√	Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN		√	Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening		√	Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito		√	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		√	Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx), atau akun-akun		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang		√	Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar		√	Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"		√	Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?			Ya
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)			Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak

2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		√	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak

TELAAH LK BLU

	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SILPA/SIKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya

4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan

Mengetahui
Pejabat Penyusun ,

Rizal Mutaqin, SE. MM.
NIP.19760521.200502.1.001

Jakarta, 6 Mei 2023
Penelaah,

Restiana Irwanti
Restiana Irwanti
NIP.19870319.200904.2.001

